

PARTISIPASI SISWA DALAM IMPLEMENTASI PLH (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP) di SMPN 7 YOGYAKARTA

THE STUDENTS PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF LIVING ENVIRONMENT EDUCATION (PLH) AT YOGYAKARTA 7 JUNIOR HIGH SCHOOL

Oleh: Satya Laksana (13110241034), FSP/ KP FIP Universitas Negeri Yogyakarta
stlaksana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang partisipasi siswa dalam implementasi PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) di SMPN 7 Yogyakarta. Mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa, guru dan kepala sekolah. Setting penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 7 Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) diamanatkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH). Partisipasi siswa dalam implementasi PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) di SMPN 7 Yogyakarta berada pada tangga *tokenisme*, pada hierarki *engagement*. Pada 6 aspek menunjukkan bahwa pada yang sudah berjalan, badan pelaksana siswa, menularkan kepada teman temannya tentang PLH, sikap belum semuanya menyikapi tapi sudah lebih baik daripada sebelumnya, sumber daya fasilitas dari BLH, komunikasi sudah berjalan dan dibantu *social media*. Faktor pendukung yaitu kesadaran siswa dalam hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari, dukungan dari sekolah yang memberikan reward kepada kelas yang terbersih agar memotivasi kelas lainnya untuk melakukan hal serupa, pemberian bantuan dari Badan Lingkungan Hidup berupa, dukungan orang tua agar membawakan bekal kepada anaknya, dukungan sekolah meskipun belum berjalan secara efektif. Lalu ditemukan juga beberapa faktor penghambat yaitu, belum mempunyai kesadaran agar berperilaku hidup bersih, pihak sekolah tidak mempunyai cadangan, kurangnya komunikasi antara siswa dengan pihak sekolah.

Kata Kunci: *Partisipasi Siswa, Implementasi Kebijakan, PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup*

Abstract

This research aimed to describe the students' participation in the implementation of living environment education (PLH) at Yogyakarta 7 Junior High School, to acquire the information regarding students' participation in the implementation of Living Environment Education (PLH) at Yogyakarta 7 JHS, to identify the supporting and inhibiting factors of the implementation of PLH at Yogyakarta 7 JHS.

This research is qualitative descriptive type of research. The subjects in this research were students, teachers, and headmaster. This research was set at Yogyakarta 7 JHS. Data was collected by conducting observation, interview, and documentation with the stages of data collection, data reduction, and data presentation. Data validity was clarified by the source triangulation technique.

The research results showed that: 1) the Living Environment Education is mandated by The Living Environment Agency (BLH), 2) the students' participations in the PLH at Yogyakarta 7 JHS are: a) the participation is at the tokenism level and b) the participation is at hierarchy engagement status. There are six aspects of students' implementations, which are: 1) Purpose, 2) Operational Board, 3) Impact, 4) Attitude, 5) Resources, and 6) Communication. There are also several supporting factors, such as 1) the students' awareness of hygiene living in daily occasion, 2) the school support to give rewards towards the cleanest student in order to motivate the other classes to conduct similar action, 3) the support from the BLH in the form of hygiene plastic bags, burlap, and drums, thus the garbage would be disposed to these containers, 4) the parents support for providing school lunch/meal for their children, 5) the school support although it has not been effectively running. There are several inhibiting factors as well, namely 1) Not 100% of students are currently aware of hygiene living behavior, 2) school does not own the replacement supplies for plastic bags and burlaps, 3) the lack of communication between students and the school officer, 4) Not 100% of parents are currently providing the school lunch/meal for their children during the school time.

Keywords: *Students' Participation, Policy Implementation, PLH, Living Environment Education*

PENDAHULUAN

Penghijauan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya dunia dalam menghadapi kerusakan lingkungan yang perlu mendapat perhatian serta penanganan secara serius dan berkelanjutan. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah bersama. Oleh karena itu, sudah sepatutnya masalah ini menjadi kepedulian dan upaya bersama.

Salah satu upaya penanganan kerusakan lingkungan dapat dilakukan melalui aspek pendidikan. Lembaga pendidikan sudah sepatutnya menjadi wadah dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Sekolah diharapkan mampu membangkitkan kepedulian lingkungan pada generasi muda, melalui siswanya. Siswa diharapkan dapat menjaga kualitas dan dituntut untuk meningkatkan upaya pelestarian lingkungan yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

Salah satu kebijakan pendidikan yang relevan pada upaya pelestarian lingkungan hidup adalah Program Adiwiyata. Program Adiwiyata merupakan salah satu Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) yang telah disepakati pada tanggal 19 Februari 2004 oleh 4 departemen, yaitu Kementrian Negara Lingkungan Hidup (KNLH), Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri. Kebijakan ini sebagai dasar, arahan, atau acuan bagi para pemangku kebijakan dalam pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup

(PLH) di Indonesia. Secara jangka panjang, kebijakan ini menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kelestarian lingkungan hidup yang ada di Indonesia.

Kebijakan di atas tentu mengalami pembaharuan sesuai dengan perkembangan jaman. Pembaharuan pelaksanaan program Adiwiyata tertera pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 02 tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata. Salah satu sekolah yang menyadari pentingnya pelestarian lingkungan hidup adalah SMP N 7 Yogyakarta. Hal ini terlihat dengan diimplementasikannya kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di sekolah. Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) yang diterapkan di SMP N 7 Yogyakarta telah dilaksanakan jauh sebelum adanya Kebijakan Pemerintah tentang Adiwiyata. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta menjadikan SMP N 7 Yogyakarta sebagai sekolah Adiwiyata. Hal ini dibuktikan dengan Keputusan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2015 Nomor 660/35 37 C.

Komitmen SMP N 7 Yogyakarta dalam melaksanakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) terlihat dari kondisi fisik sekolah. Secara fisik, kawasan SMP N 7 Yogyakarta sangat terjaga keasriannya meskipun berada di tengah kota. Keberadaan Peraturan Pemerintah tentang Adiwiyata semakin memperkuat SMP N 7 Yogyakarta dalam menjaga dan

mengembangkan konsep Pendidikan Lingkungan Hidup di sekolah. Implementasi awal dilakukan oleh sekolah melalui kerjasama dengan pemerintah. Sekolah dan pemerintah kota Yogyakarta bersama-sama melakukan kegiatan sosialisasi. Tujuan dari kegiatan ini yaitu menyemarakkan dan member semangat kepada siswa dan guru untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) tersebut.

Partisipasi seluruh warga sekolah tentu berdampak positif pada pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta. Adanya partisipasi siswa, guru maupun staff SMP N 7 Yogyakarta menjadikan kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di sekolah tersebut berjalan dengan lancar. Hal itu memberikan dampak positif yang terlihat maupun tidak terlihat. *Dampak positif yang terlihat* adalah terciptanya lingkungan di sekitar sekolah yang semakin asri. Kemudian *dampak yang tidak terlihat* adalah munculnya akmosfir pendidikan yang positif di lingkungan sekolah, seperti halnya rasa nyaman dan damai.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Memperoleh informasi tentang partisipasi siswa faktor pendukung serta faktor penghambat dalam implementaso PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) di SMP N 7 Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan adalah di SMP 7 Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Wiratama No.38, Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Telp (0274) 561374. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret - April 2017.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah warga SMP 7 Yogyakarta yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen dalam penelitian ini meliputi pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Suharsimi Arikunto 2002: 136).

Keabsahan Data

Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik Sugiyono (2014: 273).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi siswa dalam pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta

Sekolah yang tidak mengajarkan pendidikan lingkungan kepada siswa tidak akan merubah situasi dan kondisi lingkungan yang rusak menjadi baik dalam waktu yang singkat, melainkan membutuhkan waktu, proses, dan sumber daya. Atas dasar itulah Pendidikan lingkungan sedini mungkin perlu diupayakan agar dapat meminimalisasi kerusakan-kerusakan lingkungan. Sebagai contoh dengan adanya bencana lingkungan hidup seperti bencana kebakaran hutan yang tak terkendali dari tahun ke tahun yang diakibatkan dari peran manusia pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Dengan adanya pendidikan lingkungan merupakan upaya memperkenalkan siswa sekolah pada lingkungan sebenarnya yang sudah ada dalam program 5K, Keindahan, Kerapian, Kebersihan, Kepribadian dan Keamanan (Nugroho, 2007)

Pada penelitian Partisipasi Siswa di SMP N 7 Yogyakarta berupa kontribusi dalam tim siswa yang berjumlah sebanyak 40 orang siswa. 40 orang siswa tersebut diajak untuk bereksplorasi tentang masalah lingkungan di sekitar SMP N 7 Yogyakarta serta solusinya. Mengacu pada tangga partisipasi apa yang terjadi SMP N 7 Yogyakarta berada pada tangga tokeinisme di mana dalam hal ini siswa sudah dijadikan tim yang bias menyuarakan pendapatnya atau suaranya namun belum memiliki hak untuk mengambil keputusan serta kebijakan yang mana hal itu masih menjadi milik sekolah. Dengan demikian dapat digolongkan bahwa partisipasi siswa SMPN 7

Yogyakarta kedalam hierarki ketiga Partisipasi yaitu Engagement yang pada prakteknya orang tua siswa serta sekolah dalam suasana yang saling menghormati dan saling mendukung.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa partisipasi siswa dalam implementasi Pendidikan Lingkungan hidup adalah 1) membuang sampah pada tempatnya khususnya botol dikumpulkan ke dalam plastik besar apabila sudah penuh kemudian di taruh ke dalam bank sampah yang kemudian untuk dijual untuk dilakukan daur ulang, 2) membuat ceklis kelas pada masing-masing kelas kemudian ada tim yang mengecek langsung pada masing-masing kelas setiap harinya, tim akan menilai setiap harinya kelas mana yang terbersih kemudian akan dilaporkan atau diberitahukan setiap seminggu sekali, atau paling tidak sebulan sekali pada saat upacara bendera. Untuk kelas terbersih akan diberikan reward, sehingga akan memotivasi kelas-kelas lainnya untuk menjadi kelas yang paling terbersih.

Sedangkan bentuk implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta yaitu dengan cara 1) mengurangi sampah dengan cara dengan menyuruh siswa dengan membawa bekal sendiri-sendiri, 2) memilih sampah-sampah yang termasuk organik dan non organik, untuk sampah non organik seperti botol dikumpulkan dimasing-masing kelas kemudian semua dikumpulkan ke dalam bank sampah untuk dilakukan daur ulang.

Selain itu juga untuk menumbuhkan partisipasi siswa dalam Pendidikan Lingkungan Hidup, Guru PLH khususnya dan bahkan semua guru memiliki peran penting di dalam mensukseskan program PLH di sekolah, membangun gaya hidup, menanamkan prinsip-prinsip, dan menerapkan etika lingkungan hidup. Upaya agar guru mencapai tujuan. Menurut Wrightman (dalam Usman, 2008:4) peranan guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya. Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh dan panutan bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran yang berkaitan dengan tugas memberi bantuan dan dorongan, pembinaan serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah, keluarga dan masyarakat.

Guru di SMP N 7 Yogyakarta memiliki peran yang penting dalam setiap kegiatan di sekolah, karena mereka dapat mendorong siswa untuk memperluas kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip dan etika lingkungan hidup dengan memberikannya contoh. Prosedur ini merupakan suatu metode pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan siswa agar mampu

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Dulu, guru berperan sebagai penyampai materi ajar dan merupakan satu-satunya sumber belajar. Namun kini guru sudah berubah peran menjadi pembimbing, pembina, pengajar, dan pelatih. Beratnya tanggung jawab bagi guru menyebabkan pekerjaan guru harus memerlukan keahlian khusus. Untuk itu pekerjaan guru tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan.

Dapat disimpulkan peran guru sebagai pembimbing dalam penelitian ini adalah memberi tekanan kepada tugas, memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Sehingga dapat mendorong siswa untuk memperluas kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip dan etika lingkungan hidup dengan memberikannya contoh.

a Tujuan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Dalam hal ini tujuan dari Pendidikan Lingkungan Hidup adalah mengajak terutama dalam hal ini adalah warga sekolah untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya yang mana efeknya sudah terjadi dengan bentuk perubahan iklim. Setelah peduli kemudian akan diberi pengarahan lebih lanjut mengenai cara pengolahan sampah agar bisa digunakan kembali jika dimungkinkan. Tujuan lainnya dari pendidikan lingkungan hidup selain untuk menjaga iklim sekolah adalah untuk melatih karakter siswa untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah dan untuk memberi pemahaman kepada siswa pada efek

efek yang ditimbulkan oleh manfaat yang muncul dari lingkungan tersebut.

Agar terbentuk kultur siswa yang peduli terhadap lingkungan dan manfaat dari peduli lingkungan itu sendiri. Disamping itu kepedulian siswa akan juga membantu implementasi PLH di SMP N 7 Yogyakarta.

b. Badan Pelaksana

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya.

Subarsono mengungkapkan kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006: 7). Komponen dari model ini terdiri dari struktur-struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka, disamping itu perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pameran-pameran serta dalam penyampaian kebijakan. Dalam hal ini di SMP N 7 Yogyakarta terdapat tim dari siswa yang terdiri dari 40 siswa dan tim dari guru yang diketuai Ibu Pur dan dibantu oleh Badan Lingkungan Hidup serta turut serta Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Namun yang menjadi masalah disini adalah tim dari siswa tidak dapat menentukan kebijakan maupun langkah

langkah yang tidak disetujui oleh pihak sekolah. Hal ini diakibatkan karena siswa hanya eksekutor atau pelaksana dengan kata lain siswa tidak mempunyai hak untuk menentukan kebijakan.

c. Dampak

Van Meter dan Vanhorn mengungkapkan: "Sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik dukungan sumber daya ekonomi dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan dalam lingkungan politik dukungan elite politik sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan" (Meter dan Vanhorn, 1975: 471). Jika dikomparasikan dengan kondisi di SMP N 7 Yogyakarta pada aspek dampak yang dirasakan adalah dengan diadakan penanaman pohon dapat mengurangi teriknya matahari dan dapat mengurangi sampah-sampah dan bau-bau yang tak sedap disekitar lokasi. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat pihak yang belum tersentuh oleh dampak dari Implementasi PLH di SMP N 7 Yogyakarta. Hal itu bukan menjadi penghambat yang besar karena dilihat hasil observasi peneliti tidak melihat hal itu sebagai masalah yang besar dan dapat mengganggu proses implementasi PLH di SMP N 7 Yogyakarta.

d. Sikap

Sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis.

Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Wahab (2010), menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila *implementor* memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Walaupun ada perbedaan dalam menyikapi Implementasi PLH di SMP N 7 Yogyakarta namun dalam tujuannya tetap sama yaitu untuk menyukseskan Implementasi PLH di SMP N 7 Yogyakarta. Hanya saja dengan perspektif warga sekolah yang berbeda-beda yang dilatarbelakangi pemikiran individu yang berbeda dalam menyikapi dan melihat implementasi PLH di SMP N 7 Yogyakarta.

e. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain

sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: *"New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program"*.

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa:

"Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan."

Dalam penelitian di SMP N 7 Yogyakarta ini para siswa berpartisipasi sebagai sumber daya utamanya 40 siswa yang terdapat pada tim. Dalam perjalanan Implementasinya sekolah turut dibantu oleh BLH berupa penunjang seperti bak sampah dan gerobak sampah. Hal ini menurut peneliti sangat membantu proses implementasi PLH di SMP N 7 Yogyakarta karena bantuan yang diberikan merupakan hal penting dalam Implementasi PLH di SMP N 7 Yogyakarta.

f. Komunikasi

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks.

Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan

suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan.

Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Jika dikomparasikan dengan hasil penelitian di SMP N 7 Yogyakarta pada aspek komunikasi yang ada adalah dengan sudah berjalan dengan baik walaupun secara non fisik utamanya menggunakan *social media*. Meskipun komunikasi berjalan dengan baik melalui social media dalam pandangan peneliti melihat komunikasi berjalan sebaliknya ketika berada dilapangan menurut pengakuan siswa yang berada dalam tim PLH. Siswa dalam tim PLH kurang informasi dari tim guru mengenai implementasi PLH di SMP N 7 Yogyakarta sehingga membuat komunikasi yang kurang baik tim siswa dan tim guru.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara hasil penelitian, maka faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pendidikan

Lingkungan Hidup (PLH) adalah sebagai berikut:

A. Faktor Pendukung

- 1) Kesadaran siswa dalam hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari
- 2) Dukungan dari sekolah yang memberikan reward kepada kelas yang terbersih agar memotivasi kelas lainnya untuk melakukan hal serupa
- 3) Pemberian bantuan dari Badan Lingkungan Hidup berupa kantong plastik, bagor dan drum yang terbuat dari bersih agar sampah dapat dibuang pada tempat tersebut
- 4) Dukungan orang tua agar membawakan bekal kepada anaknya
- 5) Dukungan sekolah meskipun belum berjalan secara efektif

B. Faktor Penghambat

- 1) Belum 100% siswa mempunyai kesadaran agar berperilaku hidup bersih
- 2) Pihak sekolah tidak mempunyai cadangan kantong plastik dan bagor sebagai pengganti
- 3) Kurangnya komunikasi antara siswa dengan pihak sekolah
- 4) Belumnya 100% dukungan/support orangtua kepada siswa agar membawa bekal ketika pergi sekolah
- 5) Belum berjalannya efektif program kebersihan yang telah diprogramkan oleh pihak sekolah.

Ashari (2008) menegaskan hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat bisa

berjalan dengan baik apabila didukung oleh beberapa faktor, yakni: (1) adanya program dan perencanaan yang sistematis, (2) tersedianya basis dokumentasi yang lengkap, (3) tersedianya tenaga ahli, terampil, sarana serta dana yang memadai, (4) kondisi organisasi sekolah yang memungkinkan untuk meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Partisipasi siswa dalam implementasi Pendidikan Lingkungan hidup di SMP N 7 Yogyakarta adalah berada pada tangga tokeinisme yaitu siswa sudah memiliki hak menyuarakan pendapat atau suaranya namun belummiliki hak untuk megambil serta memutuskan kebijakan dan pada hierarki berada di tingkat engagement yaitu orang tua siswa serta sekolah dalam suasana saling menghormati dan saling mendukung partisipasi siswa. Sedang dalam kegiatannya partisipasi siswa bias digolongkan sebagai sumber daya non material seperti 1) membuang sampah pada tempatnya khususnya botol dikumpulkan ke dalam plastik besar apabila sudah penuh kemudian di taruh ke dalam bank sampah yang kemudian untuk dijual untuk dilakukan daur ulang, 2) membuat ceklis kelas pada masing-masing kelas kemudian ada tim yang menggecek langsung pada masing-masing kelas setiap harinya, tim

akan menilai setiap harinya kelas mana yang terbersih kemudian akan dilaporkan atau diberitahukan setiap seminggu sekali, atau paling tidak sebulan sekali pada saat upacara bendera. Untuk kelas terbersih akan diberikan reward, sehingga akan memotivasi kelas-kelas lainnya untuk menjadi kelas yang paling terbersih.

Sedangkan bentuk implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta terdapat dalam 6 aspek yaitu 1) aspek tujuan dengan terlatihnya karakter siswa yang bertanggung jawab akan membantuk kebijakan PLH berjalan dengan baik, 2) aspek badan pelaksana dengan dibentuknya tim dari siswa maka tim tersebut dapat menyuarakan pendapatnya namun belum dapat memutuskan kebijakan, 3) aspek dampak dengan berjalannya PLH dirasakan perubahan yang baik dalam lingkungan sekolah walaupun belum berdampak kepada seluruh warga sekolah, 4) aspek sikap dengan perspektif warga sekolah berbeda-beda dalam menyikapi dan melihat implementasi PLH, 5) aspek sumber daya dengan didapatnya bantuan dari BLH sangat membantu dalam proses implementasi PLH, 6) aspek komunikasi dengan adanya social media komunikasi berjalan lancer meski komunikasi secara fisik kurang.

2. Mengacu pada temuan peneliti di lapangan maka dapat di simpulan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung yaitu 1) kesadaran siswa dalam hidup bersih dalam

kehidupan sehari-hari, 2) dukungan dari sekolah yang memberikan reward kepada kelas yang terbersih agar memotivasi kelas lainnya untuk melakukan hal serupa, 3) pemberian bantuan dari Badan Lingkungan Hidup berupa kantong plastik, bagor dan drum yang terbuat dari bersih agar sampah dapat dibuang pada tempat tersebut 4) dukungan orang tua agar membawakan bekal kepada anaknya 5) dukungan sekolah meskipun belum berjalan secara efektif. Lalu ditemukan juga beberapa faktor penghambat yaitu 1) belum 100% siswa mempunyai kesadaran agar berperilaku hidup bersih, 2) pihak sekolah tidak mempunyai cadangan kantong plastik dan bagor sebagai pengganti, 3) kurangnya komunikasi antara siswa dengan pihak sekolah, 4) belumnya 100% dukungan/support orangtua kepada siswa agar membawa bekal ketika pergi sekolah

B. Saran

Berdasarkan simpulan, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Pihak sekolah hendaknya mempererat kerjasama dengan orangtua siswa agar siswa ikut menerapkan di rumah perilaku ramah lingkungan yang dibudayakan di sekolah. Pihak sekolah hendaknya lebih mengintegrasikan lagi kegiatan siswa di sekolah dengan memanfaatkan fasilitas lingkungan yang ada di sekolah dengan maksimal. Keikutsertaan siswa dalam aksi/organisasi kelingkungan yang diadakan oleh pihak luar juga hendaknya dipantau,

sehingga siswa terbiasa berkerjasama dengan masyarakat/ pihak luar sekolah.

2. Partisipasi siswa pada pengelolaan lingkungan tempat tinggal diharapkan dapat difasilitasi oleh orangtua. Seperti, disediakan tempat sampah berdasarkan jenisnya di rumah agar siswa terbiasa dengan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya.
3. Saran untuk instansi pendidikan lain, dapat menjadi model bagi sekolah lain dalam mengimplementasikan Pendidikan Lingkungan Hidup agar kita sadar akan peduli lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Yuniadhi. 2011. Menganalkan Green Lifestyle ke Anak Lewat Buku. [http://www.Kompaas.com/female/read/2011/03/04.mengenalkan.green.life style](http://www.Kompaas.com/female/read/2011/03/04.mengenalkan.green.life%20style)
- Agustino, Leo, (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung : CV. Alfabeta
- Ashari. 2008. Hubungan Sekolah dengan Masyarakat.(Online) (<http://asharikeren.wordpress.com/2008/06/15/hubungan-sekolah-dengan-masyarakat>, diakses pada 19 Mei 2017)
- Eddi, Wibowo. 2006. Kebijakan Publik Dan Budaya. Yogyakarta : YPAPI
- Fajri, Wardah. 2011. Bawa Tas Sendiri Saat Belanja! <http://www.travel.kompas.com/read/2011/03/0708271770/>
- Hamzah, Syukri. 2013. Pendidikan Lingkungan. Bandung: PT. Rafieka Aditama
- Hidayati, Nanik. 2013. Perilaku Warga Sekolah dalam Mengimplementasikan Program Adiwiyata (Studi Kasus SMK Negeri 2

- Semarang). Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Keban, Yeremias, T, (2004). Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta, Penerbit Gava Media
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2013. Panduan Adiwiyata Sekolah Peduli dan Berwawasan Lingkungan. Semarang : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Badan Lingkungan Hidup.
- Mardikanto. 2013. Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Surakarta : Pusat Pengembangan Agrobisnis dan Perhutanan Sosial
- Mawardi, dkk. 2011. Akhlaq Lingkungan. Yogyakarta: Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Oktavia Anggun Prawitrasari. 2013. Hubungan antara Tingkat Pendidikandengan Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2013. Skripsi. Unnes FIS.
- Riant, Nugroho. 2008. Kebijakan Pendidikan Yang Unggul. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Rusdiana. 2015. Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi. Bandung : Pustaka Setia
- Salim, Emil. 1983. Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Mutiara.
- Samodra, Wibawa., et.al. 2006. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sri, Suwitri. 2011. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Suharto, Edi, (2006). Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung : Alfabeta
- Susapti, P. 2010. Pembelajaran Berbasis Alam. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga. Jurnal Mudarrisa 2 (1).
- Syafaruddin. 2008. Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta
- Tilaar H.A.R dan Nugroho Riant. 2009. Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Usman, M. U. 2006. Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wahab, Abdul Solichin (2008). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Widayati, Sri. 2010. Pengertian Sampah, Cara Pemusnahan dan Pemanfaatan Sampah. www.g-excess.com
- Yayasan Garuda Nusantara.2014. Remaja Shabat Alam. Jakarta: Yayasan Garuda Nusantara.
- Yuliandari, Widyanti. 2014. Pengelolaan Lingkungan Skala Rumah Tangga. <http://www.Widyantiyuliandari.com>
- Zainal, Abidin Said. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah